

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi tentang Kekuatan modal dalam Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Studi awal tentang kekuatan modal dalam politik Indonesia dipelopori oleh Richard Robinson. Richard Robinson merupakan salah seorang penulis buku yang sangat terkenal yakni “*The Rise of Capital*” pada tahun 1986. Buku “*The Rise of Capital*” memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan politik dan ekonomi Asia serta ekonomi – politik pada umumnya. Selain itu buku “*The Rise of Capital*” juga berperan penting dalam mengubah fokus kajian Asia Tenggara dan Indonesia dari pendekatan tingkah-laku (*Behavioralism*), sistem dunia (*world system*), dan ketergantungan (*dependencia theory*) menuju pendekatan ekonomi politik pada tahun 1980-an (Vedi R Hadiz, 2013:3). Buku “*The Rise of Capital*” berhasil meletakkan posisi ekonomi – politik sebagai jantung kajian tentang politik dan masyarakat Indonesia.

Prestasi utama Richard Robinson adalah berhasil meletakkan posisi ekonomi-politik sebagai jantung kajian tentang politik dan masyarakat Indonesia kontemporer. Hal ini dilakukan melalui analisis pembentukan borjuasi Indonesia modern dan signifikansi yang dilakukannya. Puncak otoritarianisme Orde Baru Soeharto dalam menjalankan roda Pemerintahan, merupakan fokus utama dalam analisis tersebut. Ironisnya, borjuasi modern tersebut tidak ditemukan diantara

para borjuis kecil muslim tradisional. Karena borjuis muslim tradisional merupakan kaum yang memiliki pengaruh menjelang abad ke-20. Borjuis muslim tradisional juga sering menuntut perlindungan Negara Indonesia pada awal munculnya Nasionalisme Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Richard Robinson dalam Vedi R Hadiz (2013:3), yaitu:

“Borjuasi semacam itu berada di tempat lain – dalam pertumbuhan konglomerat yang dijalankan oleh penguasa etnis Tionghoa dan beberapa keluarga yang memegang kekuasaan birokrasi serta berhubungan erat dengan para konglomerat. Selain itu, kehadiran kaum borjuis baru tidak selalu memiliki implikasi terhadap munculnya “Demokrasi Borjuis” atau jenis ekonomi pasar bebas yang diidamkan para ekonom neoklasik.”

Buku “*The Rise of Capital*” juga merupakan perintis jalan (*instigator*) utama yang berhasil meletakkan posisi ekonomi – politik sebagai jantung kajian tentang politik dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Richard Robinson juga berhasil mengubah arah kajian Asia Tenggara kontemporer menuju ekonomi politik secara signifikan. Richard Robinson juga berhasil menjauhi pendekatan tingkah-laku (*behaviourism*) yang dicetuskan oleh ahli ilmu sosial Amerika pada saat itu. Dan pendekatan *Old Institutionalism* yang semakin punah dalam studi politik dan pemerintahan di Indonesia.

Buku “*The Rise of Capital*” karya Richard Robinson merupakan sebuah buku yang sangat fenomenal dalam perkembangan ekonomi – politik. Sehingga Hadiz (2013:4) memiliki 2 (dua) tujuan utama dalam mengupas buku “*The Rise of Capital*” yaitu:

- a. Menempatkan konteks yang membuat tulisan *The Rise of Capital* menjadi sangat berguna – bahkan perlu diusahakan pada tahun 1980-an.
- b. Hal ini juga dimaksudkan untuk menguji relevansi buku tersebut dengan perkembangan mutakhir dalam tiga bidang perdebatan akademis yang menunjukkan tempat *The Rise of Capital*.

Seperti kata pepatah “Tak Ada Gading yang Tak Retak”. Buku “*The Rise of Capital*” karya Richard Robinson juga memiliki kekurangan. Sehingga, buku “*The Rise of Capital*” menerima kritikan pedas. Ironisnya, kritik paling pedas terhadap buku “*The Rise of Capital*” karya Richard Robinson diungkapkan oleh Richard Tanter yang berasal dari kalangan kiri (Richard Tanter dalam Hadiz, 2013:5). Ricard Tanter mengatakan bahwa buku “*The Rise of Capital*” kurang memberikan perhatian kepada kelas-kelas sosial yang tertindas dalam struktur kapitalisme Indonesia. Namun di sisi lain, Jeffrey Winters berpendapat bahwa buku “*The Rise of Capital*” hanya fokus kepada munculnya borjuasi domestik Indonesia. Sehingga menimbulkan salah paham tentang analisis posisi struktural ekonomi ekonomi Indonesia. Apabila dilihat dari sisi perekonomian kapitalis Internasional dan bagaimana syarat-syarat perekonomian internasional akan terus-menerus mempunyai pengaruh besar atas perubahan sosio – politik Indonesia (Jeffrey Winters dalam Hadiz, 2013:5).

Teoritikus Politik Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam Vedi Hadiz (2013:7) berpendapat bahwa budaya “warga” (*civic*) dan pluralisme seharusnya muncul secara perlahan-lahan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi beberapa karya tentang “modal sosial” dan *civil society* yang dipopulerkan oleh Putnam pada tahun 1990-an. Fred Riggs juga merupakan seorang teorikus politik. Fred Riggs merumuskan tentang “masyarakat pragmatik” (*prismatic society*) dan

“pemerintahan birokrasi” (*bureaucratic polity*), misalnya, terbukti memiliki pengaruh di Thailand.

Beralih ke pendekatan ekonomi – politik merupakan keputusan yang sangat penting. Karena, pendekatan tersebut berupaya keras untuk mengkritik kaum behavioris dan pendekatan deterministik budaya yang bertujuan untuk memahami Asia Tenggara kontemporer. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menentukan hasil–hasil transformasi kapitalis yang bertentangan dengan pandangan ketergantungan yang menekankan faktor–faktor eksternal, seperti kepentingan kapital dan Negara Metropolitan. Hal ini juga memberikan keunggulan struktur sosial dan proses historis domestik di Asia Tenggara (Hadiz, 2013:8).

Edward Aspinall mencoba untuk menilai buku “*The Rise of Capital*”. Edward Aspinall menilai berdasarkan politik kelas dan demokratisasi Indonesia. Berikut ini adalah pendapat Edward Aspinall tentang buku “*The Rise of Capital*”, yaitu:

“Analisis tentang politik Indonesia tidak pernah sama sejak *The Rise of Capital* terbit pada tahun 1986. Buku karya Richard Robinson ini meletakkan analisis kelas dan ekonomi – politik di pusat pemahaman kita mengenai dinamika politik Indonesia. Para penulis yang mengupas Negara dan rezim Indonesia setidaknya harus merujuk pada buku tersebut. Transformasi tampak paling jelas di Indonesia sejak terbitnya buku itu adalah Demokratisasi Indonesia. Pada puncak periode Orde Baru muncul perdebatan tentang bagaimana mencirikan Negara otoriter, dan *The Rise of Capital* memberi kontribusi penting dalam perdebatan itu dengan memancing posisi bahwa Negara hanya dapat dipahami tautannya dengan lanskap akumulasi modal dan kelas–kelas sosial.”

Buku “*The Rise of Capital*” berperan penting dalam memicu timbulnya minat untuk menyelami lebih dalam topik hubungan bisnis Negara pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Hal utama yang dilakukan Richard Robinson dan Vedi Hadiz adalah mencari bukti tentang kepentingan–kepentingan dunia usaha yang tidak

berhubungan dengan kepentingan Negara. Kemudian Jeffrey Winters dalam Aspinall (2013:21) melakukan sebuah analisis mendalam mengenai Oligarki. Jeffrey mengambil contoh dan bersandar pada pendalaman Indonesia dan sebagian dipengaruhi oleh buku "*The Rise of Capital*".

Richard Robinson dalam Edward Aspinall (2013:21), buku "*The Rise of Capital*" lebih menekankan perkembangan Negara. Perkembangan Negara tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kapitalisme Indonesia. Selain itu, sebuah kelas kapitalis domestik dan modal milik Negara merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam membentuk sejarah kontemporer. Prestasi terbesar yang pernah dilakukan oleh Richard Robinson adalah melacak para kapitalis domestik di Indonesia modern. Para kapitalis modern tersebut adalah etnis Tionghoa dan segmen "pribumi" serta perusahaan-perusahaan milik Negara dan modal asing. Richard Robinson juga berhasil menjelaskan secara terperinci tentang konflik dan relasi diantara para kapitalis domestik. Sehingga para kapitalis domestik dapat membentuk Negara dan rezim tersebut.

Pada tahun 1986, Richard Robinson tidak melihat Negara sebagai instrumen kelas kapitalis. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan keadaan tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Richard Robinson dalam Aspinall (2013:21), yaitu:

"Salah satu pertanyaan lebih menarik terkait dengan perubahan sosial dan politik di dunia ketiga adalah apakah masyarakat Kapitalis yang diarahkan di Negara ini merupakan sebuah model sejarah baru yang akan bertahan lama atau sekedar jeda. Apakah mereka akan tertanam kuat dan menjadi matang saat kapitalisme meluas dan menjadi semakin kuat atau apakah mereka akan tunduk pada kekuatan kaum borjuis saat kelas kapitalis tumbuh berkembang. Barangkali pekerjaan utama Negara Indonesia sejak 1949 adalah menyediakan segala persyaratan bagi akumulasi modal dan

campur tangan dalam berbagai perselisihan diantara elemen – elemen modal yang berbeda dan saling bersaing. Otonomi Negara dan para pejabatnya terkait erat dengan kemajuan kelas kapitalis di Indonesia dan dominasi elemen–elemen asing dan Tionghoa. ”

Kita dapat melihat bahwa para kapitalis asing dan Tionghoa memiliki hubungan erat dengan kekuasaan politik. Secara tidak langsung, para kapitalis asing dan Tionghoa menjalankan kekuasaan politik. Hal ini justru memberikan ruang, bagi sebuah Negara yang kuat sebagai penengah dan membantu menyediakan prasyarat bagi pertumbuhan kapitalisme. Ironisnya, dalam sebuah Negara Kapitalis tempat untuk kelas kapitalis (pribumi) nyaris tidak ada. Sehingga hal ini menuntut kelas Kapitalis “pribumi” untuk tampil mandiri. Namun, kelas kapitalis “pribumi” tidak muncul secara organis dari kaum borjuis kecil Islam tradisional. Justru sebaliknya, kelas kapitalis “pribumi” lahir dari keluarga–keluarga politikus birokratis yang mengendalikan Negara dan sekutu-sekutunya. Jadi, kapitalis lahir dalam waktu yang bersamaan dengan kekuatan Negara dan berposisi dengan Negara (Richard Robinson dalam Aspinall 2013:22).

Bila kita bandingkan, kondisi tubuh modal Indonesia pada saat ini berbeda dengan kondisi tubuh modal Indonesia pada saat Richard Robinson menulis buku “*The Rise of Capital*” tahun 1986. Hubungan modal dengan Negara serta implikasi politiknya juga berbeda. Jadi, mari kita telaah beberapa perubahan dan kesinambungan penting dalam tubuh modal Indonesia (Aspinall, 2013:24-28) , adalah sebagai berikut:

Pertama, saat ini modal swasta jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan dua puluh lima tahun silam. Salah satu penyebabnya adalah perubahan dramatis basis

pendapatan Negara Indonesia. Sehingga, negara Indonesia sangat tergantung pada bisnis swasta bila dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Kedua, beberapa ciri struktural yang diidentifikasi oleh Richard Robinson sebagai penghalang bagi reformasi liberal masih tetap ada dan memiliki pengaruh sampai saat ini. Pemisahan antara modal Tionghoa dan modal “pribumi” tetap menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, etnis Tionghoa juga masih mendominasi lahan bisnis swasta.

Ketiga, bangkitnya kelas kapitalis “pribumi” yang jauh lebih kuat persis seperti jenis yang diantisipasi dalam buku “*The Rise of Capital*”. Kebijakan–kebijakan proteksionis Negara telah melahirkan para pelaku bisnis yang besar sejak tahun 1970-an. Para pebisnis tersebut juga lahir langsung dari elit politiko-birokrat.

Keempat, lahirnya bisnis lokal atau daerah dalam panggung politik. Hal ini kurang diantisipasi oleh Richard Robinson dalam buku “*The Rise of Capital*”. Sehingga sektor modal lokal merupakan pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan dari demokratisasi dan segala reformasi politik yang menyertainya. Di sisi lain, sektor modal lokal juga merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi regresi ototritarian.

Kelima, sektor–sektor modal penting lain yang menjadi fokus Richard Robinson pada 1986 mengalami perubahan jumlah yang sangat signifikan. Saat ini sektor–sektor modal lain memiliki bobot dan pengaruh yang sangat sedikit. Ironisnya, usaha bisnis milik Negara dan bisnis militer juga mengalami penurunan. Hal ini justru berbanding terbalik dengan usaha bisnis milik swasta yang semakin berjaya.

Lahan pertumbuhan modal baru mulai menjamur di Indonesia pasca deregulasi di pelbagai bidang. Meskipun telah terjadi ledakan komoditas selama lebih dari satu dasawarsa. Pertumbuhan investasi modal di bidang usaha pertambangan masih sangat kurang signifikan jika dibanding dengan era Soeharto. Berikut ini adalah pernyataan Hill dan Prateek Tandon dalam Aspinall (2013:28), yaitu:

“Selama era Soeharto, Indonesia secara teratur menarik investasi lebih dari lima persen penanaman modal eksplorasi pertambangan global, sedangkan sekarang ini hanya mampu menarik investasi kurang dari 0,5 persen. Survei-survei internasional tentang iklim investasi usaha pertambangan (misalnya survei Fraser Institute yang berbasis di Kanada) menempatkan Indonesia di peringkat terbawah dunia, sedikit di atas Zimbabwe dan Venezuela.”

Kehadiran investor asing di sektor itu telah dipandang sebelah mata oleh kaum kapitalis Indonesia. Kaum kapitalis Indonesia menikmati akses lebih besar kekuasaan politik lokal dan kemampuan lebih besar proses hukum menyangkut izin pertambangan, perlawanan, dan sejenisnya. Terlepas dari kehadiran sektor asing, kaum Borjuis Domestik Indonesia merupakan sebuah kelas yang tetap memiliki banyak ciri persis seperti yang telah diidentifikasi oleh Robinson pada buku “*The Rise of Capital*” tahun 1986. Banyak kaum borjuis yang berhasil mendapatkan kembali hak mereka yang hilang dengan cara memanipulasi program buatan penyehatan likuiditas perbankan yang dijalankan oleh Pemerintah. Sehingga, pada umumnya bisnis memaksa Pemerintah untuk menanggung beban utang mereka (Robert dan Hadiz dalam Aspinall, 2013:29). Pernyataan ini kemudian didukung oleh Jeffrey Winters. Menurut Jeffrey Winters dalam Aspinall (2013:29) menyakatan bahwa setelah otoritarianisme mengalami keruntuhan lahirlah sebuah “oligarki liar” yang tidak bisa ditertibkan, baik oleh Pemerintahan kesultanan ala

Soeharto atau supremasi hukum yang kuat ataupun lembaga–lembaga mediasi lainnya yang ada di Indonesia.

Lahirnya kelas kapitalis domestik yang lebih kuat *vis-à-vis* modal Internasional maupun Negara merupakan sebuah era yang mungkin belum menandai kemenangan modal. Justru hal ini menandai tahapan lebih lanjut kebangkitan modal. Kaum kapitalis Indonesia mampu beradaptasi dengan sangat cepat dan mudah dengan demokratisasi ditengah ancaman signifikan terhadap kapitalisme atau kepemilikan pribadi. Kemampuan demokrasi Indonesia dalam menyerap dan mengakomodasi para elit politik yang berkuasa, sebagian melalui korupsi, dan distribusi patronase. Tentu saja hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan demokrasi di Indonesia (Aspinall, 2013:30). Kemudian Philippe Schmitter juga memiliki pandangan yang mirip dengan Aspinall. Menurut Philippe Schmitter dalam Aspinall (2013:31), menyatakan bahwa:

“Salah satu pencetus dari teori demokratisasi modern, mengemukakan bahwa demokratisasi di seantero dunia ternyata jauh lebih mudah ketimbang dia dan sarjana awal lainnya perkiraan, justru karena demokratisasi sangat sedikit menghasilkan redistribusi atau reformasi lain yang mungkin merugikan kepentingan elit–elit ekonomi yang dominan”

Para teoritikus politik tersebut membicarakan tentang kelas kapitalis yang membuktikan diri terampil dan fleksibel di Indonsia. Sehingga mampu menerima tatanan–tatanan politik demokratis baru. Memasuki era baru saat ini, kelas kapitalis tersebut merongrong tatanan tersebut dari dalam melalui mekanisme “politik uang”. Namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa kita bisa melihat kelas kapitalis tersebut sebagai kekuatan pendorong demokratisasi (Aspinall, 2013:31).

Pada masa kepemimpinan otoritarian era Orde Baru, kapitalisme di Indonesia terus berkembang. Hal ini berawal dari peran-peran Pemerintah dan pemilik modal (kapital). Hubungan antara Pemerintah dan pemilik modal mulai terlihat pada tahun 1958. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) memiliki peran penting dalam hubungan tersebut. BUMN mengambil alih beberapa sektor unit usaha perusahaan-perusahaan milik Belanda, seperti perubahan kepemilikan 90 persen hasil perkebunan, 60 persen perdagangan luar negeri, 246 pabrik dan tambang, sejumlah bank dan berbagai macam industri jasa (Okezone, 7 Februari 2014).

Menurut Richard Robinson dalam Achmad Choirudin (2013:124), perusahaan-perusahaan dagang milik Belanda dinasionalisasi kemudian bergabung membentuk “delapan besar” dan memperoleh monopoli impor tiga belas komoditas, termasuk 9 bahan kebutuhan pokok hidup. Mereka menguasai 70 persen komoditas Impor yang ada di Indonesia. Sementara itu, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berhasil mendominasi perekonomian nasional. Negara mengontrol gerak kapital swasta domestik melalui Gabungan Pengusaha Swasta (GPS) dan Organisasi Pengusaha Swasta (OPS). Pemerintah Orde Baru juga membentuk Badan Musyawarah Nasional (Bamunas) sebagai saluran resmi koordinasi antara pelaku bisnis dengan perwakilannya.

Richard Robinson membangun tesis bahwa kapitalisme Negara bukan hanya sekedar pelengkap kapital swasta tetapi juga pertanda bahwa kemunculan kapital Negara. Sehingga menimbulkan berbagai kontradiksi. *Pertama*, kapitalisme Negara semakin memperkuat posisi kapitalis birokrat. *Kedua*, menguatnya pola patrimonial dan terbatasnya jumlah akumulasi kapital yang dimiliki oleh pribumi.

Ketiga, lahirnya kelas kapitalis Tionghoa yang telah mengakumulasi kapital dengan landasan sangat kokoh. Soeharto menjalin hubungan intim dengan kelompok kapital. Soeharto menjadi hamba penguasa kapital demi kepentingan pribadi, kekuasaan dan kroni–kroninya. Soeharto dan kapitalisme telah melebur menjadi satu dalam pertautan modal dan birokrasi. Sehingga melahirkan keluarga–keluarga politik dan konglomerat raksasa yang posisinya tidak dapat ditentukan oleh mekanisme pasar yang abstrak. Melainkan pertautan dengan suatu sistem patronase di bawah Soeharto. Pada era Soeharto, dukungan sistem Pemerintah internal Negara kemudian membentuk sistem kapitalisme domestik (Richard Robinson dalam Choirudin, 2013:126).

Soeharto telah melakukan kerjasama dengan pemilik modal. Hal ini terlihat dari bagaimana manuver bisnis orang–orang Tionghoa. Liem Sioe Liong merupakan seorang Tipan Mie instan yang dikenal sangat dekat dengan Soeharto sebelum menjadi Presiden. Bahkan dalam tulisan Robinson (Robinson dalam Choirudin, 2013:126), dia menjadi salah satu pemasok makanan, pakaian, senjata, ketika Belanda mulai memasuki wilayah Jawa Tengah. Buktinya, segala macam keperluan bisnis Liem Sioe Liong dipermudah ketika Soeharto menjadi presiden. Kini Liem Sioe Liong memiliki perusahaan–perusahaan besar, seperti PT. Mega (Cengkeh tahun 1966), CV. Waringin, PT. Bogasari Flour Mills (Pabrik Terigu), PT. Indofood (Makanan), dan PT. Indocement (Semen).

Berdasarkan pengamatan Richard Robinson, evolusi kapitalisme yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) tahap. *Pertama*, bertahan di periode benteng dan ekonomi terpimpin. Pada tahap ini, kapitalisme sulit bergerak karena kuatnya

pengaruh kebijakan ekonomi terpimpin di bawah Orde Lama. *Kedua*, Orde Baru mengambil alih kekuasaan dan berusaha membangun kelompok bisnis swasta. *Ketiga*, kelompok kapitalis baru yang mendapat dukungan politik penuh dari Orde Baru.

Studi tentang kekuatan modal juga dilakukan oleh Dr. Yahya Muhaimin. Yahya Muhaimin lahir pada tanggal 17 Mei di Brebes, Jawa Tengah. Yahya Muhaimin meraih gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada dan gelar Doktor dari Massachusetts Institute of Technology. Hasil tulisan Yahya Muhaimin selalu menjadi rujukan bagi Mahasiswa dan Dosen Universitas Gadjah Mada. Buku "*Bisnis dan Politik Indonesia*" merupakan disertasi Yahya Muhaimin saat mengambil gelar pendidikan Doktor di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Amerika Serikat. Namun, banyak pihak menganggap buku "*Bisnis dan Politik Indonesia*" adalah hasil duplikat. Yahya Muhaimin diduga menduplikasi buku "*Capitalism and the Bureaucratic State in Indonesia*" karya Richard Robinson.

Selain itu, Andrew McIntyre juga berupaya untuk menjelaskan tentang bisnis dalam pelaksanaan Demokrasi. Andrew McIntyre merupakan seorang Profesor Ilmu Politik di ANU. Menurut Andrew McIntyre dalam buku "*Indonesia : Democracy and the Promise of Good Governance*" (2007:108) politik demokratis dan desentralisasi Indonesia baru menciptakan kesempatan yang berbeda dan kendala bagi mereka dalam dunia politik. Seiring dengan meningkatnya permintaan bisnis dengan pelaksanaan demokratisasi. Sehingga, Pemerintah melakukan diskriminasi secara aktif yang menuntut persaingan.

Studi generasi terakhir pasca Orde Baru tentang kekuatan Oligarkhi penguasa modal dilakukan oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004) dari Murdoch University, Perth, Australia. Seperti yang kita ketahui bahwa Richard Robinson telah menyumbangkan pemikirannya untuk bangsa Indonesia. Menurut buku *Reorganising Power in Indonesia* karya Vedi R. Hadiz dan Richard Robinson (2004:147), Soeharto memimpin Negara Indonesia dengan penuh kemenangan dan tak terkalahkan. Namun, benih-benih kehancuran segera menghancurkan kejayaan Soeharto tersebut. Krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997 dan 1998 meninggalkan suatu warisan yang merusak kondisi keuangan Indonesia. Perekonomian Indonesia yang telah menikmati tingkat pertumbuhan yang spektakuler selama lebih dari dua dekade, menemukan dirinya dengan cepat dihadapkan dengan penghinaan cadangan ekonomi yang pesat sebagai mata uangnya memasuki penurunan berkepanjangan yang berlangsung selama lebih dari empat tahun.

Pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk melindungi pergeseran mata uangnya. Pemerintah Indonesia menghubungi IMF pada tanggal 8 Oktober 1997. Kemudian Pemerintah Indonesia meminta bantuan penyelamatan sebesar \$ 43 Miliar. Hal ini diumumkan pada tanggal 31 Oktober 1997 (Robinson, 2004:155). Sebagai imbalannya, IMF mulai mengubah haluan Pemerintah yang dihadapkan pada bencana fiskal dan meningkatnya utang (Robinson, 2004:158). Tidak hanya itu, Negara tidak lagi berperan untuk melindungi keluarga konglomerat. Bahkan Negara dipaksa untuk bergerak melawan mereka dan menyita aset mereka serta menegakkan pembayaran utang dalam rangka untuk melindungi posisi fiskal sendiri. Sehingga menutup kemungkinan masuknya modal asing ke Indonesia.

Berdasarkan pendapat di atas studi tentang kekuatan modal dalam politik dan pemerintahan di Indonesia masih dikuasai oleh pemilik modal asing. Kehadiran pemilik modal asing dipandang sebelah mata oleh kaum kapitalis Indonesia. Kaum kapitalis Indonesia menikmati akses lebih besar dalam kekuatan politik lokal.

B. Teori Negara Marxis

Lahirnya studi tentang Negara Marxis dipelopori oleh Karl Marx. Karl Max merupakan seorang Sosiolog asal Jerman. Karl max lahir di kota Trier (Jerman) tahun 1818. Karl Max meninggal pada tahun 1883 (Miriam Budiarmo, 2008:140). Karl Max juga berhasil menemukan sejumlah pemikiran yang sangat berpengaruh dan menjadi landasan bagi sejumlah pemikiran sosialis hingga saat ini. Istilah marxis merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada para pengikut ajaran resmi Karl Marx, Friedrik Engels (1820-1893) dan Karl Kautsky (1854-1938). Sejak akhir abad ke- 16, teori Marx dan Engels tentang Negara adalah alternatif terhadap pemikiran liberal dan filsafat Hegelian yang mendominasi peta pemikiran Barat (Eric Hiariej, 2003:266).

Pada awalnya, Marx menolak konsep tentang Negara otonom yang dicetuskan oleh Hegel. Marx juga menolak pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke tentang argumen Negara netral yang mempresentasikan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Thomas Hobbes memiliki pemikiran yang mencerminkan periode peralihan dari semangat absolutisme abad pertengahan menuju gagasan

liberalisme abad berikutnya. John Locke merupakan “*The Founding Father*” dalam tradisi filsafat liberal modern yang berhasil mendominasi politik Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad ke-18 (Hiariej, 2003:263).

Thomas Hobes dalam Hiariej (2003:263), mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu berusaha memenuhi kepuasan pribadi dengan segala cara. Konflik kepentingan dan perlombaan kekuasaan selalu mewarnai kehidupan manusia, tanpa disertai oleh rasa saling percaya dan keinginan untuk bekerjasama secara politik maupun ekonomi. Menurut Thomas Hobes “*The State of Nature*” yang brutal dan keras dapat diatasi apabila setiap individu secara sukarela menyerahkan haknya untuk memerintah diri sendiri kepada sebuah kekuasaan tunggal. Agar tercipta otoritas politik berdasarkan persetujuan rakyat dan menolak kekuasaan turun–temurun para raja. Ironisnya, pemikiran Thomas Hobes bagaikan dua sisi yang sangat bertolak belakang. Thomas Hobes menjadi seorang penganut paham liberalisme yang memahami Negara sebagai pelindung kebebasan sipil dan penjaga tertib sosial. Namun di sisi lain, Thomas Hobes memiliki gagasan–gagasan yang bertentangan dengan ajaran liberalisme. Bahkan Thomas Hobes menganjurkan Negara absolut dengan menjaga ketertiban sosial.

John Locke merupakan “*The Founding Father*” dalam tradisi filsafat liberal modern. John Locke memahami proses pembentukan Negara dalam rangka melindungi hak–hak individu yang dimiliki oleh setiap individu (John Locke dalam Hiariej, 2003:263). Legitimasi sebuah Pemerintahan tergantung pada kemampuannya menjamin keamanan dan ketertiban. Agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bebas dan sejahtera. Ironisnya, John Locke menentang

pemikiran Thomas Hobbes tentang Negara absolut. Karena dalam Negara absolut terdapat kekuasaan tak terbatas yang dapat membahayakan kebebasan, kehidupan dan hak pemilikan pribadi warga negara. Jika setiap individu menyetujui sebuah kontrak sosial untuk membentuk *an independent society* (masyarakat sipil) dan *a civil association* (Negara) maka persoalan ini dapat diatasi dengan baik. Hak menilai dan menghukum pelanggaran Negara berada di tangan setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, Negara harus mampu menjalankan tugasnya dalam mewujudkan kebebasan dan persamaan.

Hegel merupakan seorang Filsafat yang sangat terkenal. Hegel berhasil mewarisi tradisi pemikiran politik liberal. Politik liberal cenderung memisahkan Negara dan masyarakat sipil sebagai dua buah entitas bertolak belakang (Hiariej, 2003:266). Teori Hegel tentang Negara berawal dari perkembangan sejarah umat manusia yang lebih luas. Perkembangan sejarah tersebut bersifat deterministik yang mempunyai ujung yang sudah pasti. Negara berperan sebagai agen sejarah yang berupaya keras merealisasikan ide universal tersebut menjadi masyarakat sempurna. Sebaliknya, individu tidak berperan sebagai agen sejarah. Negara bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan bersama untuk kebaikan semua anggota masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang etnik, agama maupun kelas. Sehingga setiap individu harus patuh pada Negara. Hegel mengatakan bahwa masyarakat sipil sebagai wilayah pemuasan kepentingan pribadi. Menurut Jeremy Bentham dan James Mill dalam Hiariej (2003:266), manusia merupakan makhluk yang mengutamakan kepuasan pribadi.

Pada awalnya, tradisi filsafat Hegelian membawa dampak besar terhadap pemikiran Marx. Hal ini terlihat dari berbagai artikel yang ditulis untuk *Rheinische Zeitung* dari Mei 1842 sampai Maret 1843. Kemudian Marx menyadari bahwa kebanyakan para pemikir (terutama Hegel) memberikan perhatian kepada perilaku negara terlalu besar. Bahkan mereka mengabaikan arti penting *The concrete nature of circumstances* yang menentukan tindak tanduk Negara yang berasal dari tekanan kekuatan-kekuatan sosial non Negara. Hal ini terlihat dari pernyataan Miliband dalam Hiariej (2003:267), yaitu:

“Marx berulang kali menyebut Negara sebagai institusi yang melindungi kepentingan umum dan menjamin kepastian hukum bagi kemerdekaan individu. Dalam sebuah artikel yang ditulis dalam bulan Juli 1842 ia menegaskan para pemikir modern memahami Negara sebagai entitas sosial terpenting yang harus diwujudkan demi kepentingan hukum, moral dan kemerdekaan politik. Setiap individu wajib mematuhi Negara karena kepatuhan tersebut sama nilainya dengan kepatuhan pada hukum alam yang berdasarkan akal sehat. Tapi kemudian Marx mulai menyadari bahwa teori Negara yang ideal versi Hegel sering bertentangan dengan praktik Negara dalam kehidupan nyata. Dia mulai menulis, sebuah Negara yang tidak mewujudkan kebebasan rasional adalah sebuah *bad state*. Dalam tulisan lain ia mengkritik penolakan parlemen *Rhineland* terhadap hak asasi orang miskin dan menuduh pemerintah sebagai pelidung kepentingan orang kaya”

Pengaruh *Economic Base* terhadap keseluruhan bangunan *Political Superstructure* merupakan salah satu tema sentral dalam teori Marx dan Engels. Berdasarkan cara pandang strukturalis ini, Negara menggambarkan *Economic Base* dalam sebuah masyarakat. Sebuah negara dapat berkembang bila disertai dengan pembagian kerja sosial di masyarakat. Sehingga melahirkan kelas dominan dan subordinan. Marx juga menulis “Mereka adalah penguasa yang dalam segala usia telah sesuai dengan kondisi ekonomi, tetapi tidak pernah diberikan hukuman kepada mereka.” (Marx dalam Hiariej, 2003:273-274).

Argumen *base-superstructure* menimbulkan kesan reduksionisme dan determinisme ekonomi. Menurut Jessop dalam Hiariej (2003:274) menegaskan “Hal yang paling ekstrim yang dilakukan negara adalah hubungan murni dari basis ekonomi tanpa efektivitas timbal balik dan terdapat korespondensi yang sempurna antara basis dan suprastruktur”. Teori Marx dan Engels tentang Negara tidak sepenuhnya bersifat *reductionist* dan *mono determinist*. Karena Marx dan Engels mengembangkan argument *base superstructure* dan teori Negara argumentalis.

Marx dan Engels memberikan perhatian yang cukup besar terhadap analisis perjuangan kelas dalam mengembangkan pendekatan instrumentalis. Kontrol kelas pemilik modal atas kekuasaan Negara yang dilakukan untuk menindas kelas proletar, mewarnai proses perjuangan kelas (Marx and Engels dalam Hiariej, 2003:275). Selain itu, Marx dan Engels juga membahas arti penting kelas-kelas sosial lainnya seperti petani dan lumpenproletariat (Poulantzas dalam Hiariej, 2003:275). Karakter dasar kekuatan Negara tidak lagi bersifat monodeterministik dalam rangka mengikuti kehendak *economic base*. Dasar kekuatan Negara juga dipengaruhi oleh konflik kelas yang tidak selalu berlangsung dalam sistem produksi (Jessop dalam Hiariej, 2003:276).

Para pemikir liberal menekankan konflik antar individu sebagai faktor penentu perilaku Negara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran Marx dan Engels. Dimana Marx dan Engels menekankan konflik kelas sebagai dasar utama kekuatan Negara. Menurut Jessop dalam Hiariej (2003:276), “Jika negara adalah instrumen sederhana kekuasaan kelas. Jadi, bagaimana modus dominan produksi

berhasil direproduksi ketika kelas dominan secara ekonomi tidak benar-benar menempati posisi kunci dalam sistem ketatanegaraan”.

Marx dan Engels menolak teori Negara liberal maupun teori Negara yang dimiliki oleh filsafat Hegel. Sebaliknya, kedua pemikir ini justru lebih menekankan konflik kepentingan pada level masyarakat sebagai faktor penentu. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat akan menghasilkan kekuatan yang kelas sosial dominan. Dimana kelas dominan tersebut mempunyai kemampuan yang lebih besar mengendalikan Negara. Negara cenderung memilih untuk berpihak kepada salah satu kelas. Keberpihakan Negara menurut Hiariej (2003:279) perlu dipahami dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Keberpihakan pada kelas dominan merupakan konsekuensi yang sulit dielakkan karena kelas sosial ini sering kali menempati posisi paling strategis bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi.
- b. Ketergantungan pada kesehatan perekonomian sering kali memaksa Negara untuk mengambil tindakan yang bisa jadi bertentangan dengan kelas dominan.
- c. Peran aktif Negara ini bertambah penting ketika kelas dominan yang mestinya mengambil peran utama dalam proses akumulasi modal tidak cukup siap secara ekonomi maupun tidak cukup mampu secara politik, misalnya untuk mengontrol kelas subordinan.

Berdasarkan pendapat diatas Negara berperan penting untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kepastian hukum bagi individu. Negara menggambarkan *Economic Base* dalam sebuah masyarakat. Dasar kekuatan Negara juga dipengaruhi oleh konflik kelas yang tidak selalu berlangsung dalam sistem produksi. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat akan menghasilkan kekuatan kelas dominan.

C. Teori *State Capitalism* (Kapitalisme Negara)

Menurut Eric Hiariej (2006:93), peran Negara sebagai agen pembangunan dapat dilihat dengan dua cara. *Pertama*, Negara turut serta berpartisipasi secara langsung dalam memupuk modal dengan cara mempunyai sumber daya finansial dan menanam kapital di berbagai sektor usaha melalui perusahaan-perusahaan negara. *Kedua*, Negara turut serta berpartisipasi secara tidak langsung melalui perencanaan, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan kebijakan.

Pada tahun 1950-an merupakan tahap awal Negara turut serta berpartisipasi dalam bentuk pemilikan dan pemupukan kapital di Indonesia. Hal ini terlihat dari perusahaan-perusahaan Negara yang didirikan sebagai bentuk reaksi terhadap nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pemerintah baru paska 1965 melakukan beberapa perubahan besar di Indonesia, seperti pengembalian beberapa perusahaan kepada pemilik lamanya, pemberian otonomi komersial, serta menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi subyek hukum (Hill dalam Hiariej, 2006:94). Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat 2 (dua) kendala dalam pembaharuan yang dilakukan orde baru. *Pertama*, banyak perusahaan Negara keberatan untuk mengembalikan wewenang yang dimilikinya kepada Negara. Perusahaan Pertamina dan Bulog tetap berada diluar kendali Departemen Keuangan dan terus melakukan tugasnya sebagai “*state within state*” (Hill dalam Hiariej, 2006:94). *Kedua*, Pemerintah orde baru mengalami kendala serius dalam menswastakan perusahaan Negara. Para kapitalis domestik tidak mempunyai cadangan kapital yang cukup untuk memenuhi ambisi privatisasi Pemerintah. Karena menjual perusahaan Negara ke pemilik modal Internasional

merupakan upaya yang tidak mungkin (Robinson dalam Hiariej, 2006:94). Namun pada tahun 1970-an perusahaan Negara kembali memegang peran dominan. Karena ledakan minyak bumi menambah jumlah penerimaan luar negeri Indonesia. Selama tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an merupakan periode Pemerintah orde baru melakukan pendalaman industrialisasi di Indonesia. Investor domestik terbesar adalah perusahaan-perusahaan milik Negara.

Menurut Hiariej (2006:95), perusahaan Negara memiliki posisi dalam struktur perekonomian Indonesia. Perusahaan Negara berperan penting dalam mengendalikan sektor-sektor usaha yang mencakup produksi sumber daya alam, infrastruktur, manufaktur, perbankan, dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Selain itu, perusahaan Negara juga memiliki pengaruh di sektor-sektor lain seperti perdagangan, pertanian, transportasi laut, udara dan konstruksi. Menurut Robinson dalam Hiariej (2006:95), perusahaan-perusahaan yang sama juga berperan menjadi mitra utama perusahaan-perusahaan asing dalam melakukan produksi dan investasi. Jadi, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor sumberdaya alam adalah Pertamina, PT. Timah, Aneka Tambang, dan Inhutani.

“Perusahaan Negara yang bergerak di sektor manufaktur juga berada dalam kondisi yang krusial. Orde Baru tidak hanya memperkuat kedudukannya, tapi juga memperluas perannya dalam memproduksi barang-barang kapital dan setengah jadi. Ini menyebabkan perusahaan-perusahaan Negara di sektor manufaktur bertambah besar dan kian padat modal dibanding perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, Negara juga berpartisipasi dalam merencanakan dan mengembangkan kerangka regulasi yang memadai bagi pembangunan ekonomi. Dalam banyak hal, regulasi pemerintah melindungi kelas kapitalis dari persaingan bebas dan penetrasi modal asing. Selain itu, Negara juga membiayai pebisnis dalam negeri melalui berbagai aturan yang membagi-bagikan subsidi, kredit dan proyek” (Hiariej, 2006:95-96).

Menurut Robinson dalam Hiariej (2006:103), kesulitan fiskal bukanlah penghalang bagi sektor–sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sektor–sektor domestik lainnya seperti otomotif dan petrokimia. Membagikan hak monopoli, kontrak, konsesi dan kredit merupakan kebiasaan yang dilakukan Negara. Hak monopoli paling kontroversial dihadiahkan kepada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) dalam rangka membeli dan menjual cengkeh petani Indonesia.

Hal yang paling penting adalah Negara berupaya untuk melakukan rekonstruksi ekonomi untuk menyediakan kesempatan bisnis baru yang menggiurkan bagi kelas kapitalis (Hiariej, 2006:103). Negara juga membagi–bagikan patronase dan melindungi para pengusaha. Berikut ini adalah tiga sektor reformasi yang muncul sebagai wilayah pemupukan kapital yang paling menguntungkan (Robinson dalam Hiariej, 2006:103), yaitu:

- a. Reformasi investasi yang tidak hanya membebaskan penetrasi modal asing, tapi juga membolehkan perusahaan asing untuk membentuk *joint ventures* dengan mitra lokal.
- b. Reformasi swastanisasi. Alasan di balik transfer kepemilikan berkenaan dengan persoalan fiskal dan kinerja buruk perusahaan–perusahaan Negara. Tapi dalam praktiknya privatisasi tidak lebih dari sebatas pengalihan monopoli Negara menjadi swasta di sektor–sektor usaha yang menguntungkan seperti televisi, komunikasi, listrik, transportasi udara dan konstruksi dan pengoperasian jalan dan pelabuhan.
- c. Deregulasi di sektor keuangan sebagai upaya pemerintah menggalang sumber–sumber dana alternatif untuk investasi. Mobilisasi dana–dana domestic berhubungan dengan dua kebijakan reformasi Pakjun 1983 dan Pakto (Paket Oktober) 1988.

Pakjun berfungsi untuk memperbaiki efisiensi perbankan. Reformasi ini bertujuan mengubah status bank–bank Pemerintah menjadi bank komersial, yang membuat kredit Pemerintah ikut berubah haluan menjadi bank komersial. Selain itu, kredit

Pemerintah juga berubah menjadi kredit komersial (Roser dalam Hiariej, 2006:105). Pakto 1988 berfungsi untuk mempermudah pendirian Bank baru domestik maupun Bank asing beserta cabang–cabangnya yang ada di Indonesia. Dalam periode 1988-1993, bank–bank tersebut mempunyai aset yang berkembang pesat dari 24–41 persen dari keseluruhan aset industri perbankan. Ironisnya, hal ini berbanding terbalik dengan aset bank–bank plat merah merosot dari 71 menjadi 51 persen. Berikut ini adalah laporan Infobank tahun 1995 (Infobank dalam Hiariej, 2006:105), yaitu:

“Sejak penghapusan batas kredit, bank–bank miliknya leluasa mengucurkan kredit sebanyak yang mereka inginkan, yang biasanya mengalir ke perusahaan–perusahaan yang berada dalam satu grup usaha yang sama dengan bank bersangkutan. Berdasarkan sebuah laporan, dari 240 buah bank yang terdaftar pada tahun 1995, lebih dari separuhnya memberikan kredit kepada grup usahanya sendiri”

Menurut pendapat Hiariej (2006:105), kebijakan Pemerintah berhubungan erat dengan mobilisasi dana dari sumber–sumber Internasional. Karena kebijakan Pemerintah mengintegrasikan perekonomian Indonesia ke dalam proses globalisasi keuangan. Penyebab utama pengintegrasian ini adalah meningkatnya ketergantungan kapitalisme Orde Baru terhadap modal segar. Hal ini dimulai sejak krisis minyak yang mengeringkan cadangan finansial Negara. Ironisnya, jumlah modal domestik masih jauh di bawah kebutuhan investasi Indonesia. Meskipun Pakjun dan Pakto telah berhasil menggalang dana–dana dari perusahaan swasta dan individu. Dengan demikian, kondisi ini memaksa Pemerintah untuk mencari sumber alternatif dana dari luar negeri.

Pemerintah Orde Baru melakukan upaya dalam rangka membebaskan pergerakan modal asing. Hal ini dilihat dalam kebijakan reformasi yang berbeda. Kebijakan

reformasi pertama bertujuan mempermudah prosedur peminjaman Internasional yang mencakup penggantian batasan khusus dalam pinjaman asing dengan pembatasan yang bersifat harian, insentif bagi arus masuk modal jangka pendek, perlindungan dari resiko pertukaran mata uang asing dan pemberian subsidi bagi pinjaman komersial luar negeri (Nasution dalam Hiariej, 2006:105). Kebijakan reformasi kedua, berhubungan dengan deregulasi pasar modal yang terjadi tahun 1987 dan 1988. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan kembali JSE sebagai sumber dana alternatif. Berikut ini adalah beberapa cara yang dilakukan oleh reformasi pasar modal dalam menguntungkan kelas kakap (Rosser dalam Hiariej, 2006:105), yaitu:

“Kapitalis kelas kakap diuntungkan oleh reformasi pasar modal melalui tiga cara, yaitu :

- a. Mereka memperoleh akses yang murah ke modal portofolio Internasional.
- b. Mereka dapat memperluas usahanya ke wilayah industri baru yang berkaitan dengan pasar modal.
- c. Para pebisnis besar juga berkesempatan meragamkan struktur kepemilikannya”

Menurut Hiariej (2006:106), krisis minyak yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan baru kapitalisme Negara Orde Baru. Negara turut serta berpartisipasi dalam pembangunan khususnya membuat kebijakan ekonomi. Reformasi yang terjadi memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk mempertahankan jaringan Patronasenya. Krisis mata uang pada pertengahan tahun 1997 telah membawa perubahan besar di Indonesia (Hiariej, 2006:106). *Pertama*, keterlibatan eksksesif Pemerintah dalam pembangunan semakin terdesak. *Kedua*, kebiasaan yang dilakukan Pemerintah dalam membagikan Patronase melalui fungsi regulasi berada dalam ancaman serius. Di sisi lain,

Nasution juga memiliki pendapat tentang sistem perbankan dalam negeri (Nasution dalam Hiariej, 2006:108) , yaitu:

“Sistem perbankan dalam negeri merubah sebagai arus modal masuk menjadi pinjaman untuk membiayai investasi di sektor properti yang cukup menjanjikan seperti perhotelan dan penginapan untuk wisatawan, taman–taman hiburan, gedung perkantoran dan mal–mal perbelanjaan”

Kelayakan kapital sistem perbankan tidak memenuhi standar Internasional. Bahkan aturan mengenai batas pinjaman cenderung lemah, sementara peningkatan jumlah pinjaman yang terdapat dalam satu grup usaha kian membahayakan (Rooser dalam Eric Hiariej, 2006:108). Bangkrutnya beberapa bank swasta merupakan sebuah pertanda berakhirnya deregulasi perbankan. Rooser juga menambahkan bahwa, jika perusahaan–perusahaan yang tergabung dalam sebuah grup mengalami kendala maka kedua bank tersebut merasakan akibatnya (Rooser dalam Hiariej, 2006:108).

Krisis finansial memaksa Pemerintah untuk mengambil inisiatif reformasi di Indonesia (Hiariej, 2006:110). Pemerintah segera memperluas rentang campur tangannya dalam pasar mata uang asing. Namun Pemerintah gagal menekan nilai tukar Rupiah. Sehingga, BI mengambil keputusan untuk mengembangkan nilai Rupiah dan memperketat likuiditas. Hal ini bertujuan mengendalikan inflasi dan memikat pemegang Rupiah (Soesastro and Basri dalam Hiariej, 2006:110). Bahkan Pemerintah meminta bantuan kepada IMF pada tanggal 8 Oktober 1997. IMF meningkatkan tekanan untuk reformasi menyeluruh dengan menggunakan pendekatan terapi kejut (Soesastro and Basri dalam Hiariej, 2006:110). Mengurangi keterlibatannya dalam pembangunan dan merekonstruksiasi alokasi sumberdaya yang mengacu pada koneksi politik merupakan hal yang sulit

dilakukan Pemerintah. Karena hal tersebut dapat berbahaya bagi kepentingan elemen berdasarkan basis kekuasaannya (Hiariej, 2006:110).

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menciptakan peluang bagi reformasi kapitalisme Negara. Terjadinya krisis ekonomi justru memperkuat posisi teknokrat liberal dan agen–agen Internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk menggelar sebuah reformasi ekonomi liberal berdasarkan ortodoksi neoliberalisme (Hiariej, 2006:114). Semua Pemerintah baru juga dipaksa untuk menentang aliansi lama antara pejabat dan pengusaha klien yang menjadi sumber penyelewengan dan kolusi yang terjadi dalam pengalokasian kontrak pembangunan dan kredit Negara (Robinson dalam Hiariej, 2006:114). Menurut pendapat Hiariej (2006:114), selain melakukan privatisasi pemerintah–pemerintah baru juga mulai berani menggagalkan beberapa kontrak pembangunan yang menguntungkan kroni–kroni Soeharto, seperti kontrak–kontrak untuk Pertamina, PLN, dan Industri Hutan. Berikut ini adalah penilaian Hiariej tentang Reformasi sektor Negara (Eric Hiariej, 2006:114), yaitu:

“Reformasi sektor Negara untuk membersihkan model alokasi kontrak yang bersifat kolusif tidak sepenuhnya berhasil. Penilaian ulang yang dilakukan terhadap kontrak PLN beberapa tahun lalu, yang berkaitan dengan kepentingan bisnis sekutu–sekutu Soeharto, secara ironis ditolak oleh perusahaan–perusahaan asing yang sudah terlibat jauh di sektor ini. Karenanya, reformasi bukan hanya gagal menghancurkan kapitalisme Negara yang lama, tapi juga cukup berhasil melahirkan sebuah perekonomian pasar bebas.”

Selama kurang lebih 30 tahun terakhir negara memainkan peran menentukan dalam pembangunan ekonomi dan melindungi pemilik modal. Dalam hal ini, Negara tetap menjalankan fungsi penting sebagai penyedia kerangka regulasi yang

memungkinkan pasar bebas bekerja secara optimal. Fungsi penting tersebut berhubungan dengan kebijakan–kebijakan menjamin disiplin fiskal, mengurangi belanja publik, reformasi pajak, liberalisasi finansial, mendorong nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan, melancarkan investasi asing, privatisasi perusahaan Negara, deregulasi ekonomi, dan perlindungan terhadap *property rights* (Hiariej, 2006:116).

Berdasarkan pendapat diatas Negara berperan sebagai agen pembangunan. Negara turut serta berpartisipasi dalam pemilikan dan pemupukan kapital di Indonesia. Negara juga berpartisipasi dalam merencanakan dan mengembangkan kerangka regulasi yang memadai bagi pembangunan ekonomi. Negara memainkan peran dalam menentukan pembangunan ekonomi dan melindungi pemilik modal selama kurang lebih 30 tahun terakhir.

D. Kerangka Fikir

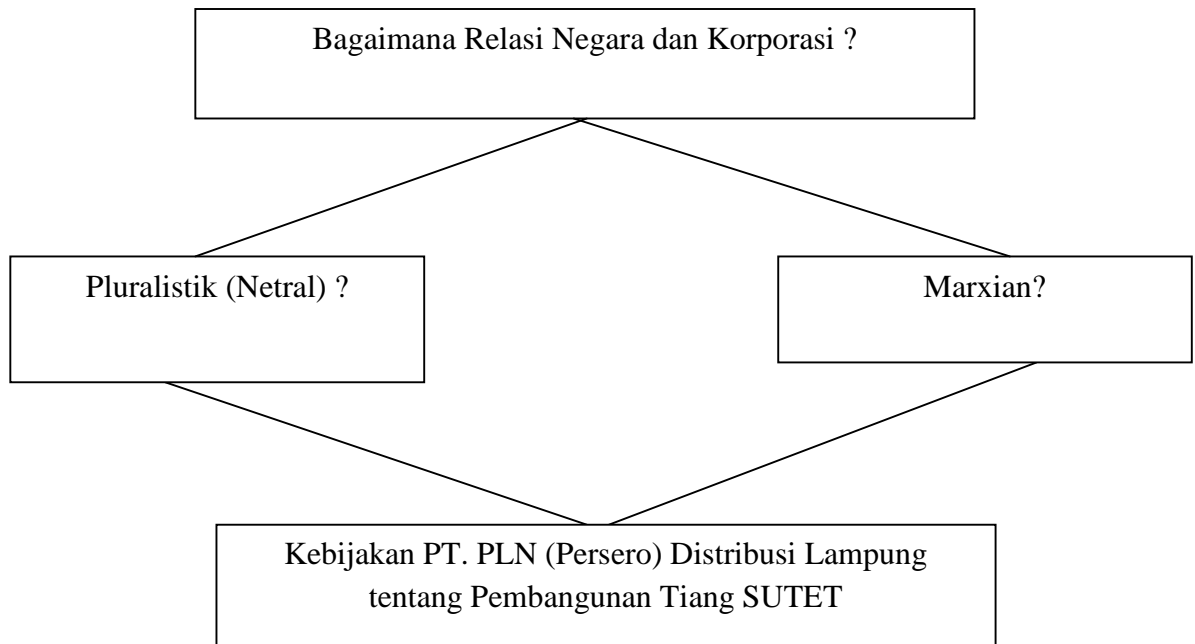
Buku “*The Rise of Capital*” juga merupakan perintis jalan (*instigator*) utama yang berhasil meletakkan posisi ekonomi–politik sebagai jantung kajian tentang politik dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Richard Robinson juga berhasil mengubah arah kajian Asia Tenggara kontemporer menuju ekonomi politik secara signifikan. Richard Robinson juga berhasil menjauhi pendekatan tingkah–laku (*behaviourism*) yang dicetuskan oleh ahli ilmu sosial Amerika pada saat itu. Dan pendekatan *Old Institutionalism* yang semakin punah dalam studi Politik dan Pemerintahan di Indonesia.

Pengaruh *Economic Base* terhadap keseluruhan bangunan *Political Superstructure* merupakan salah satu tema sentral dalam teori Marx dan Engels. Berdasarkan cara pandang strukturalis ini, Negara menggambarkan *Economic Base* dalam sebuah masyarakat. Menurut Marx and Engels dalam Hiariej (2003:273), sebuah negara dapat berkembang bila disertai dengan pembagian kerja sosial di masyarakat. Sehingga melahirkan kelas dominan dan subordinan.

Menurut Hiariej (2006:93), peran Negara sebagai agen pembangunan dapat dilihat dengan dua cara. *Pertama*, Negara turut serta berpartisipasi secara langsung dalam memupuk modal dengan cara mempunyai sumber daya finansial dan menanam kapital di berbagai sektor usaha melalui perusahaan-perusahaan negara. *Kedua*, Negara turut serta berpartisipasi secara tidak langsung melalui perencanaan, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan kebijakan.

Menurut pendapat Hiariej (2006:105), kebijakan Pemerintah berhubungan erat dengan mobilisasi dana dari sumber-sumber Internasional. Kebijakan Pemerintah mengintegrasikan perekonomian Indonesia ke dalam proses globalisasi keuangan. Penyebab utama pengintegrasian ini adalah meningkatnya ketergantungan kapitalisme Orde Baru terhadap modal segar. Hal ini dimulai sejak krisis minyak yang mengeringkan cadangan finansial Negara. Ironisnya, jumlah modal domestik masih jauh di bawah kebutuhan investasi Indonesia.

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka fikir Negara Versus Korporasi: Studi Peran Sugar Group Companies Sebagai Faktor Penghambat Pembangunan Tiang SUTET Oleh PLN di Kabupaten Tulang Bawang.